



DAMPAK IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP LAPORAN KEUANGAN MASJID (ANALISIS STUDI KASUS DIKOTA JAMBI)

Nurohimah

Universitas Jambi

Aurya Dewitri Angel Siboro

Universitas Jambi

Ratih Kusumastuti

Universitas Jambi

Jl. Jambi – Muara Bulian No. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi, Jambi.

Korespondensi penulis: nurrohimah974@email.com

***Abstract.** The mosque is one of the religious institutions that has an important role in people's lives. As an institution that receives donations from the community, the mosque has the responsibility to manage these funds properly and transparently. Mosque financial recording procedures are generally carried out manually in the mosque cash mutation book or using single method recording. One way to ensure good management of mosque funds is to apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) to its financial statements. This research uses a qualitative method, which is carried out by direct observation, interviews with mosque administrators, and analysis of related documents. Baitul Hikmah Puri Kemajuan Mosque located at JL. Kemajuan, Mendalo Darat Village, Jaluko District, Muaro Jambi Regency. This mosque was established in 1998 - Now on the initiative of Alm. Prof. Sarkawi as Chairman of the development committee which at that time was still called Mushalla. The funds used to build this mosque came from Alm. Prof. Sarkawi who was donated to the community. Recording the annual financial statements of the Baitul Hikmah Puri Progress Mosque is recording simple financial reports, or still manual, which only records cash in and out, and financial reports are more focused on cash flow reports based on the results of interviews with the mosque treasurer. The implementation of good Good Corporate Governance (GCG) has a significant impact on the quality of mosque services.*

Keywords: Good Corporate Governance, Mosque Accounting, Public Service

Abstrak. Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang menerima donasi dari masyarakat, masjid memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan transparan. Prosedur pencatatan keuangan masjid pada umumnya dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid atau menggunakan pencatatan single method. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan dana masjid yang baik adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada laporan

Received Desember 30, 2023; Revised Januari 2, 2024; Januari 3, 2024

*Corresponding author, nurrohimah974@gmail.com

keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengurus masjid, dan analisis dokumen terkait. Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan yang terletak di JL. Kemajuan, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Masjid ini berdiri pada tahun 1998 - Sekarang atas Prakarsa Alm. Prof. Sarkawi selaku Ketua panitia pembangunan yang waktu itu masih diberi nama Mushalla. Dana yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari Alm. Prof. Sarkawi yang dihibahkan kepada masyarakat. Pencatatan laporan keuangan tahunan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan adalah pencatatan laporan keuangan sederhana, atau masih manual, yaitu hanya mencatat kas masuk dan keluar, dan laporan keuangan lebih terfokus pada laporan arus kas berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan masjid. Studi kasus di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pengelolaan keuangan masjid sudah dilakukan dengan cukup baik, laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar PSAK No. 45. Oleh karena itu, penerapan GCG di masjid dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Akuntansi Masjid, Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang menerima donasi dari masyarakat, masjid memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan transparan. Prosedur pencatatan keuangan masjid pada umumnya dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid atau menggunakan pencatatan single method. Alasannya karena metode ini sederhana dan mudah dipahami. Pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani oleh bendahara masjid. Pencatatan dilakukan setiap ada pemasukan dan pengeluaran kas. Pendapatan kas masjid diperoleh dari kotak amal yang dihitung setiap hari jum'at dan penerimaan sumbangan dari masyarakat. (Nurfaisyah, A., & Herawati 2022)

Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan dana masjid yang baik adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada laporan keuangannya. Penerapan GCG pada laporan keuangan masjid dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan bahwa dana yang diterima dari masyarakat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh penerapan GCG pada kinerja keuangan perusahaan. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas pengaruh penerapan GCG pada laporan keuangan masjid. (Dewi, D. S., Susbiyani, A., & Syahfrudin 2019)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada laporan keuangan masjid memiliki dampak yang signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan dana masjid. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan laporan keuangan masjid dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada para pemangku kepentingan, seperti jamaah, donatur, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, penerapan GCG pada laporan keuangan masjid juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid (Abdullah,

A., & Wahyudi n.d.). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang terjamin, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memberikan donasi secara berkelanjutan, sehingga keberlanjutan operasional masjid dapat terjamin. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur mengenai penerapan GCG pada sektor non-profit, khususnya pada lembaga keagamaan seperti masjid. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola masjid, pihak terkait, serta peneliti dan akademisi untuk lebih memahami pentingnya penerapan GCG pada laporan keuangan masjid. (Siregar 2021)

KAJIAN TEORITIS

Good Corporate Governance

Definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Indra Surya (2006:25) adalah: Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. Sedangkan definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) adalah: Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Prinsi-prinsip Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2006) Di dalam Good Corporate Governance ada lima prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran atau kesetaraan. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapai tujuannya kelima prinsip tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. **Transparansi (Transparency)**
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dapat dijangkau publik.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat (Kumalasari & Riharjo, 2016).
3. **Responsibilitas (Responsibility)**

- Untuk prinsip *responsibilitas* atau prinsip *tanggung jawab*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independensi (Independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
 5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pengaruh GCG Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Chtorou, dkk. (2001) yang dalam penelitiannya yang menguji apakah praktik *corporate governance* mempunyai pengaruh 103 yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* akan menjadi *constrain* aktivitas *earnings management*. Penelitian tersebut menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. Dengan mengelompokkan perusahaan-perusahaan kedalam dua grup berdasarkan jumlah *discretionary accruals*, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aktivitas *earnings management* dalam perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik *corporate governance* dari komite audit dan *board of directors*.

Selanjutnya, Beasley (1996) dan Zainal, dkk. (2013) yang menduga adanya hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan, membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten. Dalam penelitiannya, Beasley (1996) secara khusus menguji hubungan antara proporsi *outside directors* dalam dewan komisaris, sebagai proxy praktik *good corporate governance*, dan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa presentasi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan berbanding terbalik dengan kualitas *corporate governance* yang baik (yang diukur lewat proporsi *outside directors* dalam dewan komisaris), dimana dengan semakin besarnya proporsi *outside directors*, terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan semakin kecil. Sedangkan Zainal, dkk. (2013) mengukur kekuatan penerapan *good corporate governance* dengan distribusi kekuasaan antara CEO dan dewan komisaris. Mereka secara khusus menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang secara konsisten menjalankan tugas mereka sebagai mekanisme *good corporate governance* akan mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Ikatan Akuntan Indonesia (Revisi 2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai penyajian kinerja keuangan yang terstruktur dari perusahaan atau entitas usaha. Pembuatan laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kinerja dari pihak yang melaporkan, sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan.

Menurut Kasmir (2013:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan

perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pospos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik 20 untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan (Bastian, 2010).

Masjid Sebagai Organisasi Sektor Publik

Masjid sebagai Organisasi Nirlaba menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dan FASB (Financial Accounting Standards Board) adalah termasuk dalam kategori non profit organization. Sedangkan non profit organization adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) sebagian besar sumberdaya organisasi tergantung pada penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan timbal balik/return, atau ikhlas menyumbangkan sumberdaya tanpa pamrih; (2)operasional organisasi adalah menyediakan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan; (3) tidak ada ownership interest (kepentingan pemilik) seperti perusahaan bisnis. Pada perusahaan bisnis, perusahaan dimiliki oleh investor (Wilson and Kattelus 2002). Wilson and Kattelus (2002) menyatakan bahwa komunitas agama termasuk dalam independent sector of not-for-profit sector yang bebas dari pajak.

Keterkaitan Masjid dengan Laporan Keuangan

Laporan keuangan masjid merupakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas, maka akan memperbesar kebutuhan informasi terhadap transparansi keuangan. Informasi keuangan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Setiap masjid pasti mempunyai aktivitas yang berbeda sesuai dengan dana keuangan masjid. Oleh sebab itu segala aktivitas yang menyangkut masalah keuangan masjid harus transparansi pengelolaannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengurus masjid, dan analisis dokumen terkait.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan yang terletak di JL. Kemajuan, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Masjid ini berdiri pada tahun 1998 - Sekarang atas Prakarsa Alm. Prof. Sarkawi selaku Ketua panitia

pembangunan yang waktu itu masih diberi nama Mushalla. Seiring berjalannya waktu, maka saat ini menjadi Masjid. Dana yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari Alm. Prof. Sarkawi yang dihibahkan kepada masyarakat. Keuangan masjid dicatat dan dilaporkan oleh Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan. Pencatatan laporan keuangan tahunan Masjid Baitul Hikmah Puri adalah pencatatan laporan keuangan sederhana, atau masih manual, yaitu hanya mencatat kas masuk dan keluar, dan laporan keuangan lebih terfokus pada laporan arus kas berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid. Pengurus Masjid Baitul Hikmah Puri Ikhlas menginformasikan laporan keuangannya melalui mikrofon masjid pada hari jumat. Yang mana bendaharawan masjid menyampaikan laporan keuangan mingguan berdasarkan pencatatan tersebut. Format laporan keuangan yang disajikan Masjid Baitul Hikmah Puri mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan masjid tersebut. Laporan ini dirancang secara komprehensif untuk mencakup analisis keuangan mingguan, bulanan dan tahunan, membantu administrator dan jemaah untuk memantau dengan cermat aliran dana masjid. Dengan laporan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengidentifikasi tren keuangan, meningkatkan strategi pengelolaan dana, dan mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan untuk masjid tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid yang Dilakukan Oleh Pengurus Masjid

Laporan keuangan masjid menunjukkan betapa pentingnya bagi manajemen masjid dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, laporan keuangan pengurus masjid untuk memastikan pengelolaan keuangan masjid tertata dan terdokumentasi dengan baik karena semua dana masuk dan keluar tersedia. Mereka juga menjadi bukti bagi komunitas masjid untuk memastikan tidak ada yang tidak diinginkan. Masyarakat berhak mengetahui dari mana dana itu berasal atau untuk apa, sehingga pembiayaan ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang keluar digunakan untuk apa, dan masjid itu sendiri menerima berapa banyak uang. Karena alangkah baiknya jika pengelola masjid harus berterus terang kepada masyarakat pada umumnya tentang laporan keuangan masjid agar tidak menimbulkan kritik atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bendahara Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan, diperoleh hasil bahwa penyajian laporan keuangan yang ada di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan belum memenuhi standar sebagai mana ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam hal ini Baitul Hikmah Puri Kemajuan hanya menyajikan laporan pengeluaran bulanan (arus kas masuk dan arus kas keluar). Bendahara Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan menyajikan pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana masjid, dimana penerimaan bersumber dari sumbangan kotak amal, zakat, infaq, shadaqah, sedangkan pengeluaran masjid meliputi pembayaran bisaroh, biaya kegiatan, operasional, dan lain-lain. Setelah melihat penjelasan mengenai pelaporan keuangan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan, diperoleh gambaran bahwa pelaporan keuangan yang disajikan oleh pihak Masjid dinilai belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK No. 45.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Terkait Transparansi di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan

Pernyataan dari bendahara menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban takmir masjid kepada masyarakat dalam melaporkan keuangannya adalah pada sholat

jum'at, shalat tarawih, pelaksanaan shalat ied dan peringatan hari besar Islam. Mereka menyatakan bahwa jumlah penerimaan dan pengeluaran diumumkan secara rinci, dari segi penerimaan misalnya jumlah kas dari kotak amal maupun sumbangan secara pribadi dan sebagainya. Dari segi pengeluaran misalnya untuk perbaikan renovasi, pembelian peralatan untuk keperluan masjid dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengurus masjid sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, menjalankan amanah dengan ikhlas tanpa mengharapkan laba atau timbal balik dari amanah yang dijalankan. Dari segi transparansi pengelola keuangan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan sudah mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dengan baik, hal ini di tandai dengan adanya manajemen rapat pengelolaan keuangan dengan pengurus masjid lainnya setiap tahun dan laporan harian kepada ketua umum. Selain itu, implementasi pengelolaan keuangan di tandai dengan pemberian fasilitas ibadah yang nyaman, kebersihan yang selalu di jaga, dan lingkungan yang selalu dirawat. Sebagai bentuk transparansi keuangan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan juga rutin melaporkan penerimaan dan pengeluaran pada saat sholat jum'at dan hari besar Islam lainnya. Penelitian ini didukung oleh (Astuti 2023) dimana dalam penelitiannya Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan masjid. Meskipun masjid merupakan organisasi nirlaba, laporan keuangan masjid tetap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Studi kasus di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pengelolaan keuangan masjid sudah dilakukan dengan cukup baik, laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar PSAK No. 45. Oleh karena itu, penerapan GCG di masjid dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Pengurus masjid telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan, tanpa mengharapkan keuntungan atau balasan apapun. Selain itu, mereka juga telah melaporkan dan mengumumkan semua kegiatan dan aktivitas dengan baik, serta rutin melaporkan penerimaan dan pengeluaran pada saat sholat Jumat dan hari-hari besar Islam lainnya. Namun, masih perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan masjid agar sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A., & Wahyudi, I. n.d. "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Keluarga." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 22(2):123–34.
- Astuti, Astuti. Agusdiwana, S. Muhammad Khaedar, S. 2023 "Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Masjid Di Kabupaten Dompu" *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*.
- Dewi, D. S., Susbiyani, A., & Syahfrudin, A. 2019. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Total Asset Turn Over dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *International Journal of Social Science*

- and Business* 3(4):473–80.
- Irawan¹, Feri, Ratih Kusumastuti², dan Gandy Wahyu Maulana Zulma³. 2022. “Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021.” *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(2):753–61.
- Kurniasari, Wiwin. 2011. “Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).” *Jurnal Muqtasid* 2:135–52.
- Manossoh, Hendrik. 2016. “GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN.” i–120.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. 1 ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- NASUTION, NUR RAYA. 2016. “ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM KAITANNYA DENGAN KEEFEKTIFAN LABA PERUSAHAAN PADA RS. GL TOBING PTPN II (PERSERO) TANJUNG MORAWA DELI SERDANG.” UNIVERSITAS MEDAN AREA, Medan.
- Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. 2022. “Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1),:206–15.
- Purwaningrum, Septa. 2018. “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PONOROGO.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO, Ponorogo.
- Siregar, Budi gautama. 2021. “ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5(1):31–41.
- Sumaizar, Eko Deswin Miechaels Siringo-ringo, R. Elfrida Panjaitan, dan Septiany A. Siallagan. 2019. “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid.” *OWNER RISET & JURNAL AKUNTANSI* 3:144–53. doi: 10.33395/owner.v3i1.113.